



# DITEMUKAN OMICRON DI SAUDI

## UMRAH-HAJI 'GALAU' LAGI

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan gambaran terbaru tentang virus corona varian, omicron. Ironisnya, di saat jemaah Indonesia yang sudah menunggu hampir 2 tahun bersiap menjalankan ibadah di Tanah Suci, omicron malah ditemukan di Arab Saudi. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai penutupan kembali akses umrah dan haji, muslim di dunia tentunya waswas. Sebab, ada bukti awal bila varian ini berisiko untuk lolos dari sistem imun tubuh dengan tingkat penyebaran yang lebih tinggi. Di dalam negeri, meski pemerintah memastikan belum ada omicron di RI tapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mulai resah. Rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan digelar. Rapat itu khusus membahas terkait Corona varian Omicron. Duh!

(Baca Hal 11)



### NEGARA- NEGARA YANG TELAH MENEMUKAN VARIAN OMICRON

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  AFRIKA SELATAN |  LESOTHO    |  ANGOLA     |
|  BOTSWANA       |  MOZAMBIQUE |  ZAMBIA     |
|  NAMIBIA        |  ESWATINI   |  HONGKONG   |
|  ZIMBABWE       |  MALAWI     |  ARAB SAUDI |

Sumber :  
berbagai sumber diolah  
Desain  
Paulus/Lentera

**GOVERNMENT TODAY****Berlebihan! MPR Minta Menkeu **Dipecat**  
Gegera Anggaran **Dipangkas****Ketua MPR,  
Bambang SoesatyoMenteri Keuangan,  
Sri MulyaniWakil Ketua MPR  
Fadel Muhammad

Jakarta- Pimpinan MPR RI meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot. Penyebabnya, anggaran MPR dipangkas. Sri Mulyani juga dinilai tidak menghargai MPR karena tidak menghadiri beberapa undangan rapat. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menanggapi terkait Pimpinan MPR yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena anggaran MPR yang turun dan diundang rapat beberapa kali tidak pernah datang. Menurutnya Pimpinan MPR sudah melampaui batas kewenangannya.

"Pimpinan MPR sudah melampaui batas kewenangannya ketika meminta Jokowi memecat Sri Mulyani. Permintaan Pimpinan MPR yang disampaikan Fadel Muhammad itu tentu mengejutkan. Sebab, sebagai pimpinan MPR bukanlah ranahnya untuk meminta presiden memecat menternya," katanya, Rabu (1/12).

Kemudian, ia melanjutkan Indonesia sebagai negara yang menganut presidensial, tentu mengangkat dan memberhentikan menteri menjadi hak prerogatif Presiden. Maka dari itu, siapapun termasuk MPR tidak berhak menekan presiden untuk memecat menternya.

Hal ini akan berbeda bila Indonesia menganut sistem parlementer.

Legislatif masih dimungkinkan untuk mengurus urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri. "Pimpinan MPR seolah tidak memahami tugas dan fungsinya setelah UUD 1945 diamandemen," katanya.

Senada, Analisis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai sikap MPR itu berlebih-lebihan. Pasalnya, anggaran yang dipotong Sri Mulyani juga untuk skala prioritas penanganan Covid-19.

"Menurut saya refocusing-nya sudah tepat karena atas skala prioritas kita untuk penanganan Covid-19. Kalau ngusulin untuk memberhentikan Sri Mulyani saya kira berlebihan itu," kata Trubus, Rabu (1/12).

Lagi pula, pemberhentian dan pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Trubus yakin orang nomor satu di Indonesia itu tidak akan mau memberhentikan Sri Mulyani karena kinerjanya yang disebut relatif baik.

"Itu kan hak prerogatif presiden, masalahnya Sri Mulyani itu sampai sekarang kinerjanya relatif baik. Saya rasa ini kan termasuk menteri kesayangan, nggak mungkin presiden mau mencopot Sri Mulyani," tuturnya.

**Jawaban Menteri Ani**

Menanggapi persoalan tersebut, Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya menjelaskan alasan ketidakhadiran dirinya dalam undangan rapat pembahasan anggaran dengan

pimpinan MPR,

"Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana ke-hadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputus-kan ditunda," ujarnya seperti dikutip, Rabu (1/12).

Mengenai pemangkasan anggaran MPR, Sri Mulyani menerangkan bahwa semua Kementerian/Lembaga dikurangi anggarannya karena adanya lonjakan kasus Covid-19 di tahun ini.

"Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah)," paparnya.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujar Sri Mulyani.

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga menegaskan kewenangan reshuffle ada pada Presiden Jokowi. "Kalau itu kan urusannya presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12).

Pratikno juga menjawab kemungkinan pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Menurut Pratikno, Jokowi belum ada rencana untuk melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat ini. Menurut dia, semua menteri dan wakil menteri yang sudah dilantik tetap bekerja seperti biasa sambil mengawasi kehadiran varian Covid Omicron dan momentum Natal dan tahun baru (nataru). Pemerintah fokus pada menggerakkan ekonomi dan mengendalikan Covid daripada reshuffle.

Perseteruan antara Sri Mulyani dan MPR berawal ketika menkeu enggan menghadiri rapat pimpinan MPR dan Badan Anggaran (Banggar) MPR RI. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengeluhkan sulitnya koordinasi antara MPR dengan Sri Mulyani.

Tak hanya itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad bahkan menilai Sri Mulyani tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan. Ia pun minta Jokowi memberhentikan Sri Mulyani. Permintaan ini, kata dia, merupakan hasil rapat bersama seluruh pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang. (ashar,ist,ant/dya

**ALASAN KEMENKEU  
TERKAIT TUDINGAN MPR****UNDANGAN RAPAT**

- Tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan.

- Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan

rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda.

**ANGGARAN MPR DIPANGKAS**

- Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk: membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi (dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp

96,86 triliun), akselerasi vaksinasi (Rp 47,6 triliun), dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

- Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

**BERAPA BESAR ANGGARAN MPR?****Tahun 2016 sampai 2020**

Anggaran MPR mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,9% peningkatan signifikan terjadi tahun 2018 dimana MPR mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp1.040,2 miliar.

**Tahun 2020**

Karena pandemi Covid-19, anggaran MPR turun dari Rp603,67 miliar menjadi Rp576,12 miliar.

**Tahun 2021**

Anggaran MPR tercatat mencapai Rp750,9 miliar yang bersumber dari rupiah murni

**Tahun 2022**

Alokasi anggaran MPR kembali turun menjadi Rp 695,7 miliar

# Didesak DPR Revisi Permendikbud 30, Menteri Nadiem Minta Waktu

Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan masih membutuhkan waktu untuk menjangkau berbagai masukan mengenai Permendikbud 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

"Kita butuh waktu untuk mendengar berbagai macam pihak. Jadi kami mohon kesabaran dan waktu untuk menyerap semua pandangan," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi Pendidikan DPR, Rabu (1/12).

Nadiem Makarim mengatakan saat ini hingga beberapa bulan ke depan masih akan memastikan semua aspirasi atau masukan mengenai Permendikbud 30 yang seimbang. Aspirasi itu, kata Nadiem, tidak hanya dari ormas keagamaan, tapi juga rektor dan mahasiswa. "Apapun revisi perubahan atau pendapat kita ingin dapatkan yang seimbang," kata dia.

Dalam rapat kerja itu, sejumlah fraksi meminta Nadiem mencabut atau merevisi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Dari Fraksi Gerindra, misalnya, Djohar Arifin Husin menilai frasa 'tanpa persetujuan korban' berpotensi melahirkan modus baru dan melindungi mereka yang melakukan seks bebas atau suka sama suka sesama jenis.

"Jelas orang tua khawatir anaknya pergi ke kampus bisa berbuat macam-macam, padahal agama manapun melarang itu berzina. Tapi di peraturan diperbolehkan kalau suka sama suka. Ini mengerikan sekali," kata Djohar.

Dari Fraksi PKB, An'im Falachuddin Mahrus, menyatakan dukungannya terhadap Permendikbud 30. Namun, ia meminta ada revisi pada frasa 'tanpa persetujuan korban' yang dinilai berbau nilai-nilai barat.

Pasalnya, menurut dia, di negara barat frasa tersebut digunakan karena menganggap masalah kekerasan seksual sebagai masalah pribadi. Sementara di Indonesia, kata dia, bukan pribadi saja yang menjadi korban namun bisa keluarga korban



Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Nadiem Makarim saat raker Komisi X DPR RI dengan Nadiem Makarim pada Rabu (1/12/2021).  
Foto.Dok

maupun warga semarga.

"Persetujuan korban tidak boleh kita telan mentah-mentah karena ini budaya barat, bukan timur. Apalagi di Indonesia mayoritas muslim. Saya setuju persetujuan korban tidak dicantumkan di sini. Kita kembalikan saja pada UU yang ada," ucap Falachuddin soal Permendikbud 30 tentang kekerasan seksual di kampus.

## Kurikulum Baru Wajib

Sementara terkait kurikulum baru, Menteri Nadiem menyatakan kurikulum yang akan ditawarkan pada 2022 merupakan bagian dari pemulihan pembelajaran akibat learning loss di masa pandemi COVID-19. Hanya saja, sekolah tidak akan dipaksa untuk menggunakan kurikulum itu.

"Kita tidak akan melakukan pemaksaan apapun dalam bentuk kurikulum. Setiap sekolah yang ingin mencoba kurikulum baru atau yang masih ingin memakai kurikulum sekarang ini, pilihan ada pada sekolah

tersebut," ujarnya.

Karena itu, Nadiem meminta tidak ada lagi kekhawatiran dari sekolah terkait keharusan menjalankan kurikulum baru 2022. "Karena ini masa pemulihan, jadi keputusan ada pada masing-masing sekolah untuk mengadaptasi dirinya untuk mencoba kurikulum yang baru atau tidak," ujarnya.

Nadiem menambahkan, "Kita akan melakukan secara bertahap, secara tenang, dengan kemerdekaan full sekolah dan tanpa paksaan. Dalam waktu dua tahun ini akan dilakukan monitoring dan observasi."

Menurut Nadiem, kebijakan pemaksaan bagi sekolah untuk menjalankan kurikulum pasti tidak akan menuai hasil yang optimal. Ia juga menyebut pemerintah akan menyediakan platform teknologi untuk membimbing sekolah dalam proses transisi. "Apapun yang dipaksakan, probabilitas suksesnya sangat rendah. Karena kemauan dari kepala sekolah dan guru untuk berubah

adalah kriteria terpenting kesuksesan (jalannya kurikulum baru)," ujarnya.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan kurikulum tahun 2022 tersebut akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi.

Menurutnya, kurikulum yang berfokus pada materi esensial penting agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. "Jadi bukan sekadar kejar tayang materi yang ada di buku teks," ujarnya.

Adapun, anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira mengkhawatirkan ruang keluasaan untuk memilih menggunakan kurikulum baru atau tidak, bisa menyebabkan ada sekolah yang tertinggal. "Harus ada endorse bagi yang belum siap, kalau tidak akan terjadi gap yang makin besar antara sekolah mampu dan tidak mampu. Harus ada treatment juga agar sekolah-sekolah ini sama," ujar politisi PDI Perjuangan itu. (ashar,par/dya)

## GEBRAKAN NADIEM DI PERMENDIKBUD

### Nadiem terbitkan Permendikbud Ristek 30/2021

- Atur soal Penanganan dan Pencegahan kekerasan Seksual (PPKS)
- Nadiem sebut belum ada UU tangani kekerasan seksual di kampus
- Tuai pro dan kontra, disebut bolehkan seks bebas dan LGBTQ+

### Perdebatan Tak Berujung?

- RUU PPKS juga alami persoalan mirip

- Dianggap permisif terhadap seks bebas dan LGBTQ+
- Muncul draf baru, dinilai tak lagi berpihak ke korban

### Ada apa dengan Kemendikbudristek?

#### Juli 2020

- Mundurnya PGRI, NU, PP Muhammadiyah, dan Majelis Dikdasmen dari Program Organisasi Penggerak (POP)

#### September 2020

- Hilangnya beberapa mata pelajaran dalam rencana penyederhanaan

kurikulum untuk TA 2021/2022 : Agama ke Budi Pekerti, Sejarah ke IPS, Penyederhanaan mapel IPA

#### Februari 2021

- Menerbitkan SKB Tiga Menteri. Melarang Pemda untuk menerbitkan peraturan yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan atribut agama pada seragam sekolah negeri

#### April 2020

- Tidak adanya frasa "Agama" dalam Peta Jalan Pendidikan 2035.
- Hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib perguruan tinggi.

- Kamus Sejarah Indonesia tidak memasukkan nama beberapa tokoh nasional seperti KH. Hasyim Ashari

#### September 2021

- Pembubaran BSNP dan digantikan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang berada di bawah Kemendikbudristek.

#### November 2021

- Prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak mencantumkan nilai moral, kesucilaan, dan ketakwaan.
- Permendikbud 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

# Sebanyak 21 Bukti Pencemaran PT Greenfields Diserahkan 258 Warga Blitar

**B**LITAR - Perkara gugatan Class Action warga terhadap PT Greenfields di Pengadilan Negeri (PN) Blitar memasuki sidang pembuktian. Warga melalui Tim 8 kuasa hukumnya, menyerahkan 21 bukti untuk memperkuat adanya pencemaran.

Disampaikan perwakilan Tim 8 kuasa hukum warga, Joko Trisno Mudiyanto kalau dalam sidang awal pembuktian ini, diserahkan bukti-bukti berupa foto, video, dokumen dan berita media online. "Seluruhnya sudah kita serahkan pada majelis hakim, untuk memperkuat gugatan," ujar Joko, Rabu (1/12/2021).

Adapun 21 bukti yang diserahkan terdiri dari : 6 macam dokumen, 2 macam bukti foto dan video yang menunjukkan adanya pencemaran. "Dalam foto dan video tersebut, lengkap dengan keterangan tanggal, waktu dan titik koordinat lokasi adanya pembuangan limbah," jelasnya.

Sedangkan 13 macam bukti lainnya, berupa pemberitaan dari 10 media online dan 3 media televisi yang dimuat dalam Youtube. Bukti berita ini, untuk memperkuat kondisi yang sebenarnya didapatkan oleh media. "Dalam berita kan juga ada fakta, yang disampaikan oleh wartawan," tandas Joko.

Sedangkan bukti dokumen yang disampaikan diantaranya KTP 9 orang koordinator perwakilan kelompok warga penggugat, surat

pernyataan perwakilan kelompok, KTP 258 warga penggugat dan dampak limbah PT Greenfields, daftar kerugian warga terdampak dari Kecamatan Wlingi, Doko dan Gandusari. Serta daftar kualifikasi 258 warga korban terdampak limbah PT Greenfields.

Mengenai agenda sidang selanjutnya, Joko mengungkapkan yaitu Pemeriksaan Setempat (PS), adalah pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh majelis hakim di tempat objek yang sedang disengketakan. Majelis hakim datang ke tempat objek tersebut, untuk melihat secara langsung keadaan objek yang disengketakan. "PS sudah diagendakan pada Kamis 9 Desember 2021 mendatang, dengan langsung datang ke lokasi atau objek yang digugat warga yaitu adanya pencemaran lingkungan," terang Joko.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidang 15 November 2021 lalu, majelis hakim PN Blitar telah membacakan putusan sela yang isinya menolak eksepsi turut tergugat dan PN Blitar berwenang mengadili perkara ini tanpa dihadiri tergugat maupun turut tergugat 1 dan 2. Sehingga sidang dilanjutkan, dengan agenda persidangan pembuktian surat pada 1 Desember 2021.

Perkara ini berawal adanya gugatan 258 KK dari Kecamatan Doko, Wlingi dan Gandusari Kabupaten Blitar yang terdampak pencemaran

lingkungan. Mereka mengajukan gugatan class action pada PT Greenfields Indonesia, serta Gubernur Jatim dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim sebagai turut tergugat 1 dan 2. Menuntut ganti rugi materiil dan immateriil dengan total mencapai Rp 24,2 miliar lebih, akibat dari limbah yang mencemari sungai dan perkebunan.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Blitar pada 5 Juli 2021 lalu, dengan no perkara : 77 / P d t . G / L H / 2021/PNBlit dan sidang pertama pada 21 Juli 2021. Warga yang menggugat dari kelompok petani, peternak ikan, peternak kambing dan sapi serta warga pengguna air sungai. Besarnya gugatan materiil bervariasi mulai dari Rp 2,4 juta - Rp 40 juta per 2 tahun, kemudian gugatan immateriil sebesar Rp 100 juta/KK totalnya mencapai miliaran rupiah.

Secara terpisah kuasa hukum PT Greenfields, Michael Jhon Amalo Sipet ketika dimintai komentarnya terkait persidangan hari ini menjawab kalau



Sidang pembuktian gugatan 258 warga terhadap PT Greenfields di PN Blitar, Rabu (1/12/2021). (Foto: Arief S/Lentera)

pihaknya akan melihat dulu bukti permulaan yang disampaikan penggugat. "Tadi penggugat kan sudah menyampaikan bukti-bukti, ada foto dan video nanti akan kita pelajari dulu," kata Michael.

Ditambahkan Michael bukti seperti foto dan data-data yang diajukan penggugat seperti yang sudah disampaikan diawal, jadi nanti setelah dipelajari pihaknya akan mengajukan bukti juga. "Nanti dalam persidangan selanjutnya, kita juga akan mengajukan bukti-bukti," pungkasnya. (ariefsukaputra/dya)

## Wadahi Kreasi Pelajar Disabilitas, Banyuwangi Gelar Festival Kita Bisa



Pelajar dari kalangan disabilitas saat berlaga di perlombaan catur dalam Festival Kita Bisa Banyuwangi, Rabu (1/12/2021). Foto: Dok. Pemkab Bwi

**B**anyuwangi - Peringatan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati tiap 3 Desember, digelar di Kabupaten Banyuwangi sejak awal bulan ini. Peringatan tersebut diawali dengan gelaran Festival Kita Bisa yang dihelat di SD Negeri Model, Sobro, Banyuwangi, Rabu (1/12). Festival tersebut menampilkan beragam kreasi seni

dan olahraga dari anak-anak muda penyandang disabilitas.

"Dengan festival ini, kita ingin mewujudkan apa yang disebut dengan education for all. Pendidikan untuk semua. Di festival inilah, kita memberi ruang dan panggung bagi anak-anak penyandang disabilitas," terang Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak untuk memperoleh pendidikan secara setara tanpa adanya diskriminasi.

"Oleh karena itu, kami di Banyuwangi berupaya keras untuk mewujudkan apa yang menjadi amanat ini. Semua sekolah di Banyuwangi kami dorong menjadi sekolah inklusi yang mengharuskan kami untuk

menerima pelajar penyandang disabilitas," papar Ipuk.

Sejak 2013, Banyuwangi memang berupaya untuk mewujudkan sekolah inklusi yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Secara bertahap jumlah sekolah inklusi terus bertambah. Hingga hari ini, semua sekolah negeri dari tingkat PAUD sampai SMA/ Sederajat telah berstatus inklusi. "Sebagai bentuk perhatian, pemerintah memberikan insentif khusus bagi guru pendamping pelajar penyandang disabilitas," paparnya.

Bupati Ipuk menambahkan, Banyuwangi menaruh perhatian dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. "Tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, kami juga berusaha untuk memenuhi hak-hak kaum disabilitas dalam berbagai bidang. Seperti halnya dalam dunia kerja, pelayanan umum sampai terpenuhinya fasilitas disabilitas di tempat-tempat publik secara bertahap," terang Ipuk.

Hal tersebut, imbuh Ipuk, telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan

dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. "Aturan ini secara bertahap kita jalankan. Kami berkomitmen untuk bisa memenuhinya," lanjutnya.

Festival Kita Bisa ini sendiri merupakan ajang kreasi bagi siswasiswi penyandang disabilitas tingkat Sekolah Dasar se-Kabupaten Banyuwangi. Perlombaan ini juga sekaligus sebagai ajang seleksi untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur dan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat Jawa Timur untuk kategori disabilitas. "Perlombaan antara lain atletik, bulutangkis, catur, menyanyi dan menggambar," terang Kepala Dinas Pendidikan Suratno.

Penyelenggaraannya sendiri dibagi di lima tempat. Selain di SDN Model, Sobro, yang menjadi lokasi pembukaan, juga bertempat di empat sekolah lainnya. Di antaranya di SDN 1 Lateng, SDN 1 Kebalenan, SDN 1 Mojopanggung dan SDN 4 Penganjuran. "Biar tidak terjadi penumpukan. Karena acara ini, menerapkan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya. (pj moko/dya)

# UMK Tertinggi di Indonesia: Bekasi Memimpin, Geser Karawang



(Ilustrasi) Demo buruh teras mendesak pembatalan UMP dan menaikkan besaran UMK tahun 2022. Foto: Dok.

Jakarta - Klasemen Upah Minimum Kota (UMK) tertinggi di Indonesia kini bergeser dari Kabupaten Karawang kepada Kota Bekasi. Semula, Karawang menjadi wilayah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada tahun 2021, nilainya sebesar Rp 4.798.312, sementara Kota Bekasi di posisi kedua dengan Rp 4.782.935,64.

Namun, untuk tahun depan posisinya bakal bergeser, dimana ketika UMK Karawang tidak mengalami kenaikan, UMK Kota Bekasi justru naik sebesar 0,71% menjadi Rp 4.816.921,17. Sementara itu, Kabupaten Bekasi tetap menempati posisi ketiga dengan Rp 4.791.843,90 atau sama dengan UMK 2021.

Perubahan klasemen di peringkat pertama itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

Dalam Keputusan tersebut, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menimbang

penetapan UMK berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.

"Bahwa upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dihitung berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum tahun berjalan, ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat Provinsi, dalam rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," tulisnya.

Lebih lanjut, Ridwan Kamil dalam Keputusan ini menegaskan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja dengan masa

kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha menyusun dan memperlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

## Di Jatim, Surabaya Terbesar

Sementara itu, di wilayah Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa akhirnya menerbitkan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk tahun 2022. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022.

Khofifah dalam Keputusan ini memperhatikan beberapa hal, di antaranya Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Nopember 2021 dan tanggal 29 Nopember 2021 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020.

"Rekomendasi Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan," tulis Keputusan tersebut dalam salinan yang diterima Rabu, (1/12).

Dalam Keputusan tersebut, nampak sejumlah wilayah mengalami kenaikan UMK. Kota Surabaya kembali menjadi wilayah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur dengan nilai Rp 4.375.479,19, naik dibanding tahun ini yang hanya Rp 4.300.479.

Di posisi kedua ada wilayah industri Kabupaten Gresik dengan nilai UMK Rp 4.372.030,51, atau naik dari Rp 4.297.030,51. Sementara di tempat ketiga ada Sidoarjo dari Rp 4.293.581,85 menjadi 4.368.581,85.

Sementara itu UMK dengan nilai terendah ada di Kabupaten Sampang dengan Rp 1.922.122,97. Tercatat ada 14 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki nilai UMK di bawah Rp 2 juta. Selain Kabupaten Sampang ada Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo.

Terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur, Rabu (1/12) menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Timur terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022.

"Kami, Apindo Jawa Timur kecewa sekaligus menyayangkan keputusan Gubernur Jawa Timur terkait penetapan upah minimum kabupaten kota tahun 2022. Khususnya untuk Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan dan Mojokerto yang tidak sesuai dengan PP 36 tentang pengupahan yang mutlak berlaku sebagai bentuk kepastian hukum dunia usaha di Jawa Timur," terang Johnson M Simanjuntak, Wakil Ketua DPD Apindo Jawa Timur.

Namun demikian, tambah Johnson pihaknya, Apindo Jatim tetap menghormati keputusan yang dibuat pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut. "Meskipun ada rasa ketidakadilan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. Hal ini juga menimbulkan disparitas atau jarak perbedaan upah yang semakin jauh," tambah pria yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim ini.

Apindo Jatim, tegas Johnson juga menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan pekerja atau buruh melalui aksi demo yang sudah dilakukan beberapa hari lalu. "Kami berharap bahwa aksi-aksi tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegas Johnson.

Sementara itu, disampaikan Hari Purnama divisi advokasi Apindo Jatim bahwa pihaknya sesegera mungkin melakukan persiapan-persiapan terkait dengan langkah hukum yang akan ditempuh. "Tentunya kami akan melakukan jalur hukum dalam hal ini. Dan kami sesegera mungkin akan menyusun persiapan-persiapan untuk itu," pungkash Hari Purnama. (ashar, surya, ant/dya)

## UMK JATIM 2022

1. Kota Surabaya: Rp4.375.479
2. Kabupaten Gresik: Rp4.372.030
3. Kabupaten Sidoarjo: Rp4.368.581
4. Kabupaten Pasuruan: Rp4.365.133
5. Kabupaten Mojokerto: Rp4.354.787
6. Kabupaten Malang: Rp3.068.275
7. Kota Malang: Rp2.994.143
8. Kota Pasuruan: Rp2.838.837
9. Kota Batu: Rp2.830.367
10. Kabupaten Jombang: Rp2.654.095
11. Kabupaten Probolinggo: Rp2.553.265
12. Kabupaten Tuban: Rp2.539.224
13. Kota Lamongan: Rp2.501.977
14. Kota Mojokerto: Rp2.510.452
15. Kabupaten Jember: Rp2.355.662
16. Kota Probolinggo: Rp2.376.240
17. Kabupaten Banyuwangi: Rp2.328.899
18. Kota Kediri: Rp2.118.116
19. Kabupaten Bojonegoro: Rp2.079.568
20. Kabupaten Kediri: Rp2.043.422

21. Kota Blitar: Rp2.039.024
22. Kabupaten Tulungagung: Rp2.029.358
23. Kabupaten Blitar: Rp2.015.071
24. Kabupaten Lumajang: Rp2.000.607
25. Kota Madiun: Rp1.991.105
26. Kabupaten Sumenep: Rp1.978.927
27. Kabupaten Nganjuk: Rp1.970.006
28. Kabupaten Ngawi: Rp1.962.585
29. Kabupaten Pacitan: Rp1.961.154
30. Kabupaten Bondowoso: Rp1.958.640
31. Kabupaten Madiun: Rp1.958.410
32. Kabupaten Magetan: Rp1.957.329
33. Kabupaten Bangkalan: Rp1.956.773
34. Kabupaten Ponorogo: Rp1.954.281
35. Kabupaten Trenggalek: Rp1.944.932
36. Kabupaten Situbondo: Rp1.942.750
37. Kabupaten Pamekasan: Rp1.939.686
38. Kabupaten Sampang: Rp1.922.122

## UMK JABAR

1. Kota Bekasi -> Rp 4.816.921,17
2. Kabupaten Karawang -> Rp 4.798.312,00

3. Kabupaten Bekasi -> Rp 4.791.843,90
4. Kota Depok -> Rp 4.377.231,93
5. Kota Bogor -> Rp 4.330.249,57
6. Kabupaten Bogor -> Rp 4.217.206,00
7. Kabupaten purwakarta -> Rp 4.173.568,61
8. Kota Bandung -> Rp 3.774.860,78
9. Kota Cimahi -> Rp 3.272.668,50
10. Kab. Bandung barat -> Rp .248.283,28
11. Kabupaten sumedang -> Rp 3.241.929,67
12. Kabupaten Bandung -> Rp 3.241.929,67
13. Kabupaten sukabumi -> Rp 3.125.444,72
14. Kabupaten subang -> Rp 3.064.218,08
15. Kabupaten Cianjur -> Rp 2.699.814,40
16. Kota sukabumi -> Rp 2.562.434,01
17. Kabupaten indramayu -> Rp 2.391.567,15
18. Kota tasikmalaya -> Rp 2.363.389,67
19. Kabupaten tasikmalaya -> Rp 2.326.772,46
20. Kota Cirebon -> Rp2.304.943,51
21. Kabupaten Cirebon -> Rp2.279.982,77
22. Kabupaten majalengka -> Rp2.027.619,04
23. Kabupaten garut -> rp1.975.220,92
24. Kabupaten kuningan -> rp1.908.102,17
25. Kabupaten ciamis -> rp1.897.867,14
26. Kabupaten pangandaran -> 1.884.364,08

# IMPRESSION



## H. RAHMAT SANTOSO, SH.MH : Terjun ke Politik Untuk Mengabdikan Pada Masyarakat, Bukan Mencari Cuan

BLITAR - Sosok H. Rahmat Santoso, SH.MH memang baru di dunia politik, setelah puluhan tahun malang melintang sebagai seorang lawyer (pengacara). Namun tujuannya bergabung dengan partai PAN, hanya ingin mengabdikan pada masyarakat dan bukan mencari cuan (keuntungan). Demikian tekad seorang Rahmat Santoso, yang kini menduduki kursi Wakil Bupati Blitar periode 2021-2026, setelah terpilih dalam Pilkada Kabupaten Blitar, Desember 2020 lalu.

Sejak awal dilantik pada Februari 2021, menjadi orang nomor dua di Kabupaten Blitar mendampingi Bupati Blitar, Hj. Rini Syarifah untuk menjabat periode 2021-2026, Wakil Bupati H. Rahmat Santoso, SH.MH sudah menunjukkan itikad tidak mau aji mumpung atau memanfaatkan fasilitas sebagai seorang pejabat. Jatah kontrak rumah dinas (rumdin) sebesar Rp 250 juta setahun, tidak diambil dan ia memilih 'ngekost' di salah satu kamar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN). "Karena keluarga di Surabaya dan saya sering sendiri di Blitar, juga menghemat uang negara saya numpang di pendopo tentunya seijin Mbak Rini (Bupati Rini)," tutur pria kelahiran Tulungagung ini..

Sebagai orang nomor dua di Bumi Penataran julukan Kabupaten Blitar, dalam menjalankan tugasnya, pria yang akrab disapa Makdhe Rahmat ini tidak mau melebihi kewenangannya sebagai Wabup Blitar. "Selalu komunikasi dengan Mbak Rini (Bupati Rini), hampir setiap hari kita diskusi dan koordinasi dalam melaksanakan tugas memimpin Blitar," papar pria yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.

Sesuai dengan program Panca Bhakti dalam kepemimpinannya, Makdhe Rahmat berusaha mewujudkannya meskipun dengan keterbatasan yang ada. "Karena saya terpilih saat pandemi Covid-19, anggaran dipangkas untuk fokus penanganan Covid. Aktifitas juga dibatasi, jadi pelan tapi pasti, saya bersama Mbak Rini berusaha mewujudkan program untuk pembangunan Kabupaten Blitar agar bisa maju bersama sejahtera bersama," tandas Ketua MPP DPD PAN

Kabupaten Blitar ini.

Melalui kerja sama, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik jajaran OPD Pemkab Blitar, Forkopimda, instansi vertikal baik tingkat provinsi maupun pusat. Makdhe Rahmat berusaha mencari terobosan untuk bisa memajukan Kabupaten Blitar, meskipun di tengah pandemi Covid-19. "Prioritas utama menangani Covid-19. Kalau sudah terkendali, maka perekonomian daerah bisa bangkit dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik," terang Makdhe Rahmat.

Makanya ketika kasus Covid-19 tengah melonjak, ditambah lagi terjadi kekurangan Swab Test, kesulitan oksigen dan peralatan medis lainnya, Makdhe Rahmat bertindak cepat, mencari bantuan baik ke provinsi maupun pusat. "Sampai saya bisa mendapatkan bantuan Swab, ventilator dan mesin PCR dari Kemenkes RI, serta pasokan oksigen dari Madiun. Karena bantuan dari kolega atau kenalan baik dari TNI-Polri, pengusaha, politisi maupun komunitas dan ormas," ungkap Makdhe Rahmat yang juga aktif sebagai MPO Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya ini.

Selain peralatan medis, saat pandemi Covid-19 Makdhe Rahmat juga bisa mendapatkan bantuan sembako dan makanan siap saji dari salah satu perusahaan besar, untuk membantu warga yang terdampak, juga untuk para nakes.

Ketika pandemi sudah mulai mereda, Makdhe Rahmat langsung melakukan upaya pemulihan ekonomi daerah. Diantaranya dengan menjalin komunikasi dengan sesama kepala daerah dan pengusaha, untuk memasarkan produk unggulan Kabupaten Blitar. "Blitar terkenal sebagai penghasil ayam dan telur,

maka saya berusaha mengajak pengusaha membeli hasil ternak, pertanian dan produk Blitar lainnya," bebarnya.

Dalam upaya mencari bantuan maupun memasarkan produk unggulan Kabupaten Blitar, suami dari Venina Puspasari ini mengaku memakai biaya pribadi. "Karena semua tahu kondisi negara sedang kesulitan anggaran, saya juga sudah niat menjadi Wabup Blitar untuk mengabdikan dan melayani masyarakat, bukan bertujuan mencari cuan atau keuntungan pribadi," tegas Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Dalam birokrasi Makdhe Rahmat ingin mewujudkan perubahan dan reformasi birokrasi, mulai dari hal terkecil. Clean and Good Government, seperti tidak ada lagi budaya bagi-bagi proyek. "Apalagi pengkondisian atau jatah proyek untuk wakil bupati, silahkan dicek. Semua budaya semacam itu harus dihilangkan, harus sesuai mekanisme dan aturan yang ada," harap pengusaha otomotif dan sarang walet ini.

Penghobi Moge jenis Harley Davidson ini juga memiliki program bidang kesehatan dan pendidikan gratis, dimana saat ini sedang diupayakan mendapat alokasi anggaran baik dari APBD daerah, provinsi maupun APBN pusat. "Termasuk masalah infrastruktur jalan, beberapa konsep kerja sama dengan swasta juga sedang digodok. Karena perlu terobosan, tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja," jlentrehnya.

Tidak hanya urusan hukum, bisnis, politik dan berorganisasi, Wabup Rahmat tidak melupakan bidang sosial. Tidak jarang ketika menjalankan tugasnya, mendadak bertemu nenek atau ibu-ibu tua, beliau langsung membantu. "Setiap melihat ibu-ibu tua yang kelihatan

kesusahan hidupnya, saya tidak tega dan berikan bantuan untuk meringankan beban hidupnya," ceritanya.

Bahkan tanpa diketahui banyak orang, ternyata Wabup Rahmat juga mempunyai anak asuh yatim piatu yang dibiayai hidup dan sekolahnya. "Dosa besar saya kalau sampai ada anak yatim piatu tidak terurus dengan baik, bagi saya kehidupan dunia dan akhirat kalau bisa seimbang. Hidup jadi lebih berarti, kalau bermanfaat untuk orang lain," pungkasnya.

Kiprah seorang Rahmat Santoso dalam mendukung pemulihan ekonomi di Kabupaten Blitar, diakui banyak pihak di antaranya Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Eko Susanto yang mengetahui dengan persis apa yang sudah dilakukan atasannya tersebut. "Kalau berbicara apa yang sudah dilakukan Pak Wabup, memang beliau sudah banyak mendatangkan bantuan baik dari provinsi maupun pusat," kata Eko.

Termasuk jaringan dari para pengusaha, juga sudah banyak yang didatangkan dan memberikan bantuan untuk Kabupaten Blitar. "Salah satunya anak perusahaan Unilever, yang memberikan bantuan sembako dan makanan saat pandemi Covid-19 lalu," bebarnya.

Eko mengakui urusan eksternal Pemkab Blitar, memang banyak dibantu Wabup Rahmat. Karena kepiawaiannya dalam melakukan lobi, serta gaya komunikasi yang bisa diterima semua kalangan. "Pak Wabup bisa diterima semua kalangan, karena komunikasi beliau cukup baik sehingga bisa connect dengan siapa pun mulai internal birokrasi, eksternal, elemen masyarakat, kelompok, organisasi dan warga biasa diterima dengan baik," pungkasnya. (Arief Sukaputra/Endang)

## PROFIL

- Nama :**  
H.Rahmat Santoso SH.MH
- Jabatan Sekarang :**  
Wakil Bupati Blitar periode 2021-2026
- Tempat Tanggal Lahir :**  
Tulungagung, 17 Mei 1978
- Istri :**  
Venina Puspasari
- Anak :**  
1. Aurellia Gabriela Santoso  
2. Rasha Rafael Santoso
- Agama :**  
Islam
- Hobby :**  
Otomotif
- Karir Politik dan Organisasi:**
- Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)
  - Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI)
  - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila Kota Surabaya
  - Ketua MPP DPD PAN Kabupaten Blitar
  - Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur



# 10 IDE FOTO KELUARGA UNTUK DICOBAKAN TAHUN DEPAN

**L**iburan akhir tahun akan segera tiba, dan akan cukup banyak hal yang kita pertimbangkan. Biasanya kita akan buru-buru mencoba mengumpulkan ide foto-foto liburan keluarga tepat waktu untuk kemudian menyematkan foto-foto tersebut pada kartu-kartu ucapan dan mengirimnya melalui email atau pos. Kabar baiknya, kami telah mengumpulkan ide foto keluarga paling kreatif di luar sana, dan semuanya dapat dibuat ulang dengan mudah!



► Ide Foto Keluarga  
Foto: Berbagai Sumber



## 1. Nuansa Luar Ruang

Foto luar ruangan dapat berupa apa saja yang Anda inginkan, tergantung pada lokasi dan properti. Kami menyarankan ide sederhana untuk mengabadikan momen foto candid yang manis.



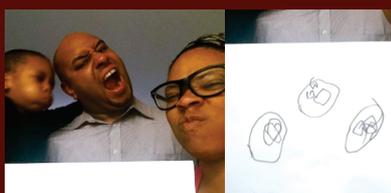
## 4. Gunakan Cermin

Menggunakan cermin untuk "mengambil gambar" adalah pose tradisional yang menyenangkan. Plus, Anda mungkin bisa melakukannya tanpa sesi fotografi!



## 5. Tetaplah Nyata!

Terkadang anak-anak tidak mau bekerja sama. Alih-alih stres dan khawatir tentang mendapatkan foto-foto keluarga, ikuti saja arusnya. Biasanya berakhir menjadi lebih otentik dan akan membuat semua teman Anda tertawa.



## 6. Berpose Seperti Coret Moret Anak Anda

Sumber inspirasi terbaik

terkadang ada di rumah Anda sendiri. Mintalah seluruh keluarga membuat ulang gambar atau sketsa favorit. Anda tidak hanya akan mendapatkan tawa dari teman dan keluarga, tetapi ini adalah kesempatan bagus untuk memamerkan keterampilan artistik Picasso yang sedang berkembang.



## 7. Manfaatkan Elemen Daun dan Pohonan

Jika kita berada di puncak permainan kita, kita biasanya mengambil foto liburan kita saat puncak musim gugur daripada musim dingin. Jika Anda tidak ingin menunggu turun hujan pertama atau Anda tinggal di tempat yang lebih sejuk, lemparkan dedaunan ala musim gugur itu ke udara dan tangkap keajaiban musiman (dan masa kanak-kanak).



## 8. Refleksikan Keutuhan Keluarga

Jika kita berada di puncak permainan kita, kita biasanya mengambil foto liburan kita saat puncak

musim gugur daripada musim dingin. Jika Anda tidak ingin menunggu turun hujan pertama atau Anda tinggal di tempat yang lebih sejuk, lemparkan dedaunan ala musim gugur itu ke udara dan tangkap keajaiban musiman (dan masa kanak-kanak).



## 9. Latar Belakang Papan Tulis

Jika Anda memiliki akses ke papan tulis, jadilah liar dengan desain cerdas seperti yang dilakukan ibu dan keluarganya ini.



## 10. Bingkailah Keluarga Anda

Ambil bingkai kosong dan coba berbagai pose. Mintalah anak-anak kecil berdiri di depan bingkai, atau tekan seluruh kelompok di belakang bingkai.



## 2. Tambahkan Piyama Santai

Jika ada yang lebih lucu dari piyama santai yang serasi, kami belum menemukannya. Kangan khawatir, semua jenis piyama tersedia cukup banyak sebelumnya di lemari pakaian sehingga Anda tidak perlu menunggu hingga mendekati akhir pengambilan foto.



## 3. Tampilkan Snack Dalam Foto Anda

Kecuali Anda memiliki anak yang masih sangat kecil sehingga membuatnya berantakan, mungkin menyenangkan menambahkan camilan favorit keluarga Anda ke foto liburan keluarga.

# Konvensi Budapest, Komitmen Dunia Memerangi Cybercrime

Revolusi teknologi yang melesat cepat ditandai dengan terciptanya world wide web atau biasa disingkat www, oleh Berners-Lee di awal tahun 1990. Penemuan ini memungkinkan manusia untuk saling mengirimkan informasi, dari mana saja kemana saja dan kapan saja, dalam jaringan internet, tanpa kendala. Saat inilah ruang dan waktu menjadi tidak penting, karena bisa ditembus dengan jaringan internet tanpa hambatan.

Perkembangan internet selanjutnya memicu munculnya beragam media sosial, aplikasi, website, dan berbagai program lainnya, membawa manusia ke dalam pusaran yang berbahaya. Internet telah membawa manusia berinteraksi satu sama lain tanpa perlu bertemu secara langsung.

Proses ini membuka peluang bagi seseorang untuk menjadi pelaku kriminal dan memberikannya kekuatan, sehingga memunculkan ancaman kejahatan dunia maya (cybercrime), seperti pencurian informasi, sabotase, peretasan, penyebaran informasi palsu, dan lain-lain. Hal ini terbukti bahwa munculnya kejahatan siber berjalan seiringan dengan perkembangan internet.

Pada masa-masa awal internet booming, misalnya, beberapa kali dunia dihebohkan dengan kasus cybercrime. Tahun 1994, sekelompok pemuda asal Rusia meretas sistem perbankan Amerika Serikat dan berhasil memindahkan uang senilai \$10 juta dollar dengan memanfaatkan kelemahan pada sistem komputer kas institusi. Selanjutnya di tahun 1999, terdapat virus yang menyerang sistem komputer seluruh pengguna Microsoft Word di dunia. Virus tersebut berhasil membuat server email di banyak perusahaan dunia dan lembaga pemerintahan menjadi kelebihan beban dan arus lalu lintas internet global shutdown.

Atas dampak yang luas, Federal

Bureau of Investigation (FBI) bahkan memasukkan dua kasus tersebut dalam "Major Cybercrime Case". Meski demikian, kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya laporan serupa di seluruh dunia.

Memerangi kejahatan siber, sebagaimana dijelaskan pakar keamanan dan pertahanan siber internasional Solange Ghernaouti dalam Cyber Power: Crime, Conflict, and Security in Cyberspace, membutuhkan posisi politik yang kuat dalam tingkatan global. Tujuannya untuk menyatukan badan-badan publik ataupun swasta dan memobilisasi mereka untuk bekerja sama secara nasional dan internasional.

Cybercrime tidak dibatasi oleh batas-batas geografis. Seorang penjahat dapat melakukan aksinya dari suatu negara yang berbeda dengan negara targetnya. "Hukum domestik terbatas pada wilayah tertentu, tetapi pertukaran elektronik atau aliran data tidak mengenal batas geografis apa pun. Satu-satunya jawaban adalah mengatasi masalah hukum terkait keamanan dan kejahatan siber di tingkat internasional. Dalam konteks Internet dan dunia maya, penting untuk mengadopsi kerangka kerja dan instrumen internasional yang memadai yang menghormati hak asasi manusia (hak keamanan di dunia maya)," tulis Ghernaouti.

Salah satu kawasan yang memiliki perhatian lebih terhadap masalah ini adalah Eropa. Merujuk riset Chat le Nguyen dan Wilfred Golman berjudul "Diffusion of the Budapest Convention on Cybercrime and the Development of Cybercrime Legislation in Pacific Island Countries" (2020), kawasan Benua Biru telah berkomitmen sejak lama terhadap kejahatan siber.

Melalui Majelis Eropa (Inggris: Council of Europe [CoE]), negara-negara Eropa sejak tahun 1970-an hingga 1990-an, berulang kali melakukan perundingan guna membahas

persoalan ini. Hasilnya sejumlah pedoman terkait dinamika dunia maya. Sayangnya pedoman itu sangat tidak mengikat dan tidak dapat menahan laju kejahatan siber.

Puncak dari perundingan baru terjadi ketika memasuki abad ke-21, masa ketika internet bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat dunia, khususnya negara-negara Barat, dan sudah banyak yang menyadari ancaman kejahatan siber.

Pada 23 November 2001, tepat hari ini dua dekade lalu, Majelis Eropa menyelenggarakan konvensi kejahatan dunia maya di Budapest, Hungaria, dan untuk pertama kalinya menghasilkan aturan yang mengikat. Pertemuan yang menghasilkan Budapest Convention ini dimaksudkan untuk menyelaraskan aturan kriminalisasi domestik yang terkait dengan sistem komputer dan data; menyediakan otoritas peradilan pidana nasional dengan sarana yang diperlukan untuk penyelidikan dan penuntutan tindak pidana; dan membangun mekanisme kerja sama internasional yang efektif dalam memerangi pelanggaran-

pelanggaran ini.

Meski termasuk perjanjian regional, namun hasil dari konferensi ini tersebar secara global dan menjadi pionir dalam perang melawan kejahatan siber. Penyebabnya karena terdapat satu hal penting dalam pembahasan yakni diperbolehkannya dalam negara-negara non-Eropa meratifikasi hasil perjanjian.

Berdasarkan riset Nguyen dan Golman, konvensi ini kini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk kerjasama transnasional melawan kejahatan dunia maya, tetapi juga sebagai pedoman atau model hukum untuk penyusunan undang-undang anti-kejahatan siber di hampir 80 persen negara di seluruh dunia.

Konvensi ini bisa dianggap sebagai dasar komitmen dunia internasional untuk memerangi kejahatan siber. Selanjutnya, adalah komitmen para penegak hukum di negeri ini yang harus pula memiliki gerak yang seirama, agar jalur internet tidak lagi dijadikan jalan tol bagi para pelaku kejahatan siber untuk beraksi. (berbagai sumber/Endang)



HARIAN "LENTERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

**MEDIA TERVERIFIKASI**



**BIRO: SURABAYA:** LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH, **DESAIN GRAFIK** PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

**LISTSTYLE**

# ALL ABOUT HIGH HEELS

**D**i samping menambah kesan anggun, sepatu hak tinggi atau high heels, juga dapat menambah rasa percaya diri, bagi sebagian wanita. Namun jika terlalu sering dipakai, jenis sepatu ini bisa berdampak buruk bagi postur tubuh. Selain itu, sepatu hak tinggi juga bisa meningkatkan risiko terjadinya cedera.

Berjalan dengan mengenakan sepatu high heels tentu berbeda dengan saat mengenakan sepatu hak rendah. Penyesuaian yang dilakukan anggota badan saat mengenakan sepatu high heels ini yang akan mempengaruhi postur tubuh.

Saat mengenakan sepatu hak tinggi membuat tubuh harus menyesuaikan postur untuk menjaga keseimbangan. Beban tubuh pun akan ikut bergeser ke arah depan dan

menyebabkan kaki harus menumpu tambahan beban tubuh sebesar 20 persen.

Tubuh bagian bawah yang condong ke depan, yaitu pinggul dan lutut, membuat punggung bagian atas harus lebih condong ke belakang.

Demikian pula ketika berjalan dengan mengenakan sepatu hak tinggi. Otot-otot pinggul dan lutut yang berperan besar dalam setiap pergerakan kaki, akan bekerja lebih keras. Posisi ini juga membuat lutut mendapat tekanan lebih besar.

Di samping membatasi pergerakan dan tenaga dari sendi pergelangan kaki, sepatu hak tinggi juga membuat lutut tetap bengkok saat berjalan.

Pemakaian sepatu hak tinggi terlalu sering, lama-kelamaan bisa berisiko menyebabkan berbagai masalah kesehatan berikut ini:

## 1. Osteoarthritis

Tekanan pada lutut akibat penggunaan sepatu hak tinggi bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya osteoarthritis. Kondisi ini terjadi karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi yang mengakibatkan peradangan, pembengkakan, dan rasa nyeri.

## 2. Achilles tendinitis

Tendon Achilles berperan penting pada pergerakan kaki ketika berjalan. Pemakaian hak tinggi secara terus-menerus dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan peradangan pada tendon ini dan menyebabkan tendinitis.

Kondisi ini terjadi karena adanya peradangan pada tendon Achilles atau jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di kaki bawah bagian belakang ke tulang tumit.

Selain otot betis yang terasa menegang saat meregangkan kaki, penyakit ini juga dapat menyebabkan nyeri dan bengkak pada tumit saat berjalan. Jika sering mengalami peradangan atau cedera, tendon Achilles akan berisiko robek. Kondisi ini membuat Anda tidak dapat berjalan.

## 3. Metatarsalgia

Sepatu dengan hak tinggi dan runcing akan menghasilkan tekanan berlebih pada telapak kaki bagian depan atau tepat di bawah jari kaki, sehingga menyebabkan rasa sakit akut pada area tersebut.

Jika tidak segera ditangani, kondisi ini akan menimbulkan keluhan yang menetap dalam jangka panjang atau bahkan menyebabkan keretakan pada tulang kaki.

## 4. Skiatika

Pertambahan beban pada jari-jari

kaki membuat tubuh condong ke depan saat berdiri dan berjalan. Akibatnya, terjadi tekanan berlebih pada lutut, pinggul, dan punggung bagian bawah.

Perubahan postur itulah yang menyebabkan skiatika, yaitu kondisi ketika saraf skiatik terjepit dan menyebabkan nyeri serta mati rasa dari punggung dan menjalar hingga ke kaki.

Jika terdapat gejala lain, seperti sulit buang air kecil atau besar dan kaki terasa sulit digerakkan, Anda perlu segera berobat ke dokter. Hal tersebut bisa menjadi pertanda adanya kerusakan saraf yang parah.

## 5. Plantar fasciitis

Beberapa wanita yang mengenakan sepatu hak tinggi sering mengalami pemendekan tendon Achilles akibat tumit yang meninggi. Padahal, tendon ini didesain untuk dapat bergerak secara fleksibel.

Kondisi ini memicu terjadinya plantar fasciitis, yaitu peradangan dan nyeri pada plantar fascia atau jaringan tebal di bagian bawah kaki yang menghubungkan tulang tumit ke jari kaki.

## 6. Bengkoknya jari kaki

Tekanan secara terus-menerus pada telapak kaki bagian depan akibat penggunaan sepatu hak tinggi dapat mengakibatkan kelainan bentuk kaki seperti hammer toes. Kondisi ini ditandai dengan bengkoknya 3 jari kaki paling tengah.

Selain itu, terlalu sering menggunakan sepatu hak tinggi juga bisa menyebabkan munculnya bunion atau benjolan tulang pada pangkal jempol kaki.

## 7. Fraktur halus

Sepatu dengan hak yang sangat



(Ilustrasi) Penggunaan Sepatu Hak Tinggi yang sehat  
Foto: Apostolos Vamvouras

tinggi dapat menekan tulang telapak dan jari-jari kaki serta saraf di sekelilingnya. Tekanan secara terus-menerus pada tulang-tulang ini dapat berisiko memicu keretakan atau fraktur halus.

## 8. Keseleo pada pergelangan kaki

Stiletto atau sepatu dengan hak tinggi dan lancip adalah jenis sepatu yang paling berisiko menyebabkan cedera. Berat tubuh yang bertumpu hanya pada dua ujung hak berbentuk lancip dapat meningkatkan risiko terjatuh dan mengalami keseleo, terutama pada permukaan lantai atau jalan yang licin.

## 9. Sakit punggung bagian bawah

Menggunakan sepatu hak tinggi dapat mengubah bentuk tulang belakang dan menyebabkan sakit punggung bagian bawah karena otot punggung yang meregang atau saraf yang terjepit.

Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang dengan foto Rontgen, MRI, atau USG dapat digunakan untuk mendeteksi jenis penyakit atau cedera yang terjadi karena pemakaian sepatu hak tinggi. (Isti/Endang)

## TETAP SEHAT DENGAN SEPATU HAK TINGGI

1. Pilihlah sepatu yang memiliki tinggi hak tidak lebih dari 2-3 cm, terlebih jika Anda menggunakan jenis sepatu tersebut setiap hari, misalnya untuk bekerja.
2. Selangi penggunaan sepatu hak tinggi dengan sepatu yang lebih nyaman, sehingga kaki dapat bergerak secara alami dan leluasa.
3. Kenakan sepatu dengan hak paling tinggi hanya sesekali pada acara-acara khusus, misalnya pesta pernikahan.
4. Hindari memilih sepatu hak tinggi dengan ujung lancip atau ukuran yang terlalu kecil. Selain itu, pilihlah sepatu dengan hak lebih lebar daripada stiletto.
5. Lakukan peregangan kaki setiap hari untuk melemaskan otot betis hingga jari-jari kaki.
6. Lebih cermat dalam memilih sepatu hak tinggi dan memerhatikan waktu penggunaannya dapat membuat Anda tetap tampil percaya diri serta terhindar dari risiko cedera dan penyakit.



**Ditemukan Omicron di Saudi ....(dari hal 1)**

**A**rab Saudi mengkonfirmasi penemuan kasus pertama varian Omicron. Pemerintah setempat menyebut kasus itu berasal dari salah satu negara di Afrika Utara. Pernyataan tersebut disampaikan pemerintah lewat kantor berita setempat pada Rabu (1/12). Pemerintah memastikan tindakan kesehatan sudah diambil terhadap kasus varian Omicron tersebut.

"Pelaku perjalanan serta orang yang kontak dengannya telah diisolasi," sebut keterangan pemerintah setempat seperti dikutip dari Arab News.

Kemunculan kasus pertama itu seiring dengan mulai dilonggarkan pembatasan terkait pandemi COVID-19 di Saudi. Beberapa pelaku perjalanan, termasuk dari Indonesia, sudah diizinkan masuk Saudi.

Terkait kemunculan kasus baru ini, otoritas Saudi belum memberikan keterangan secara detail. Varian Omicron masuk dalam kategori variant of concern oleh WHO. Sebab, varian Omicron lebih menular dibanding varian-varian lain.

Kasus pertama varian Omicron di Arab Saudi muncul bertepatan dengan dibukanya pintu masuk untuk 6 negara, termasuk Indonesia.

Lantas, bagaimana nasib umrah dari Indonesia yang baru saja dibuka? Konsul Jenderal (Konjen) KJRI Jeddah, Eko Hartono, mengungkapkan saat ini kebijakan ibadah umrah masih berlanjut.

"Untuk umrahnya sendiri sampai sekarang belum ada perubahan kebijakan dari Saudi. Artinya, persiapan terus dilakukan, tidak ada perubahan kebijakan. Mudah-mudahan ke depan tidak ada," ucap Eko ketika dihubungi, Rabu (1/12).

Satu kasus varian Omicron tersebut adalah pelaku perjalanan dari salah satu negara di Afrika bagian utara. Ini menjadi kasus varian Omicron pertama di kawasan Timur Tengah

dan utara Afrika. Eko mengatakan, Pemerintah Saudi telah mengupayakan pencegahan penyebaran varian tersebut.

"Sudah diambil langkah cepat untuk melokalisir orang itu [penderita COVID-19 varian Omicron], merawat, dan sebagainya. Dan tracing (pelacakan) sudah segera dilakukan supaya tidak meluas. Mudah-mudahan enggak," jelas Eko.

"Belum [ada informasi lebih lanjut dari Pemerintah Saudi]. Jadi langkah-langkah apa, apakah ada perubahan kebijakan soal umrah, sejauh ini belum ada. Tapi mudah-mudahan tidak," tutup Eko.

Penemuan varian Omicron dilaporkan oleh Afrika Selatan kepada WHO pada 24 November 2021. Varian yang diklasifikasikan sebagai Variant of Concern (Varian yang Mengkhawatirkan) ini diketahui memiliki lebih banyak mutasi dibandingkan dengan varian sebelumnya.

Varian ini ditakutkan dapat lebih mudah menular dan mengurangi efektivitas vaksin. Namun, masih diteliti apakah varian ini bisa menyebabkan gejala yang lebih berat atau tidak. Puluhan negara di dunia sudah menutup perbatasannya dari negara-negara di selatan Afrika, seperti Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Malawi, Lesotho, dan Mozambik.

Varian ini telah ditemukan di banyak negara, seperti Australia, Belanda, Inggris Raya (termasuk Skotlandia), Kanada, Jepang, Brasil, Nigeria, hingga yang terbaru adalah Arab Saudi.

**Jokowi Gelisah**

Presiden pun langsung menggelar rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Rapat itu khusus membahas terkait Corona varian Omicron.

"Tadi pagi, pak presiden memanggil beberapa menteri terkait, ada menteri Menko Marves, Menko

Perekonomian, menteri luar negeri diwakili Wamen, dan beberapa menteri lain secara spesifik bahas Omicron," kata Mensesneg Pratikno kepada wartawan di Istana, Rabu (1/12).

Pratikno mengatakan Indonesia harus belajar dari perkembangan kasus COVID-19 di negara lain. Jokowi meminta semua pihak waspada. "Kita juga belajar dari beberapa negara lain dengan adanya kasus ini. Intinya kita harus selalu waspada, selalu standby, jadi semua kapasitas yang ada harus selalu siaga. Dalam waktu dekat, akan ada penjelasan lebih lanjut dari menko terkait," ujar Pratikno.

Pratikno juga mengungkap arahan Jokowi soal pentingnya kerja cepat. Selain itu, vaksinasi juga diminta terus ditingkatkan.

"Selalu waspada. Jadi selalu mengikuti dinamika di lapangan dan bereaksi cepat terhadap kemungkinan itu. Dan terus vaksinasi, beliau juga akhir minggu yang lalu khusus rapat mengenai percepatan vaksinasi. Karena kita juga akan mendapatkan lagi stok vaksin yang bertambah. Kita percepat vaksinasi. Tentu saja protokol kesehatan tetap dijaga. Ke-waspadaan, kecepatan beraksi, seandainya ada masalah, terus dijaga. Oleh karena itu tadi juga beliau bertanya seandainya ada kasus, bagaimana rumah sakit- rumah sakit darurat itu diaktifkan, semua menyatakan tetap siaga, jadi kita tetap siaga," beber Pratikno mengungkap arahan Jokowi.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M Nur mengungkapkan saat ini seluruh pihak terkait untuk perjalanan sudah memenuhi syarat.

"Kami sebagai penyelenggara berkomitmen dan memastikan untuk memenuhi syarat dan semuanya sudah siap," katanya.

Firman menyebutkan, kondisi ini diharapkan tidak akan mengganggu rencana perjalanan jemaah umrah asal Indonesia. Apalagi saat ini di Indonesia

masih relatif aman dari kasus varian baru. "Kecuali ada kebijakan dari mereka yang menentukan," jelas dia.

Tapi sejauh ini, pihak otoritas Arab Saudi sudah mengizinkan Indonesia sebagai negara yang bisa menjalani ibadah umrah dan mengizinkan penerbangan langsung.

Para pelancong dari enam negara, yakni India, Mesir, Pakistan, Indonesia, Brasil dan Vietnam, sekarang bisa masuk ke wilayah Saudi tanpa harus menghabiskan 14 hari di luar negara-negara tersebut sebelum masuk tiba di Saudi.

Selain Arab, Korea Selatan melaporkan empat suspek kasus varian Omicron di negara itu, pada Rabu (1/12). Pemerintah Korsel me-nyampaikan ada empat suspek kasus varian baru ini, termasuk pasangan yang baru-baru ini bepergian ke Nigeria.

Mengutip kantor berita Chosun, pasangan tadi tiba di Bandara Internasional Incheon pada Rabu (24/11), setelah sebelumnya pergi ke Nigeria. Kedua orang ini kemudian dipastikan positif Covid-19 sehari setelahnya.

Pesawat yang dinaiki pasangan ini membawa 81 penumpang dari Nigeria, sempat melakukan transit di Ethiopia, dan hanya membawa 45 penumpang ke Korsel.

Satu orang lain yang menjadi suspek merupakan teman pasangan ini. Ia sempat mengantar pasangan tadi ke rumah setibanya mereka di bandara. Satu orang suspek lain adalah anak laki-laki si teman, yang mendapatkan hasil positif Covid-19 pada Selasa (30/11).

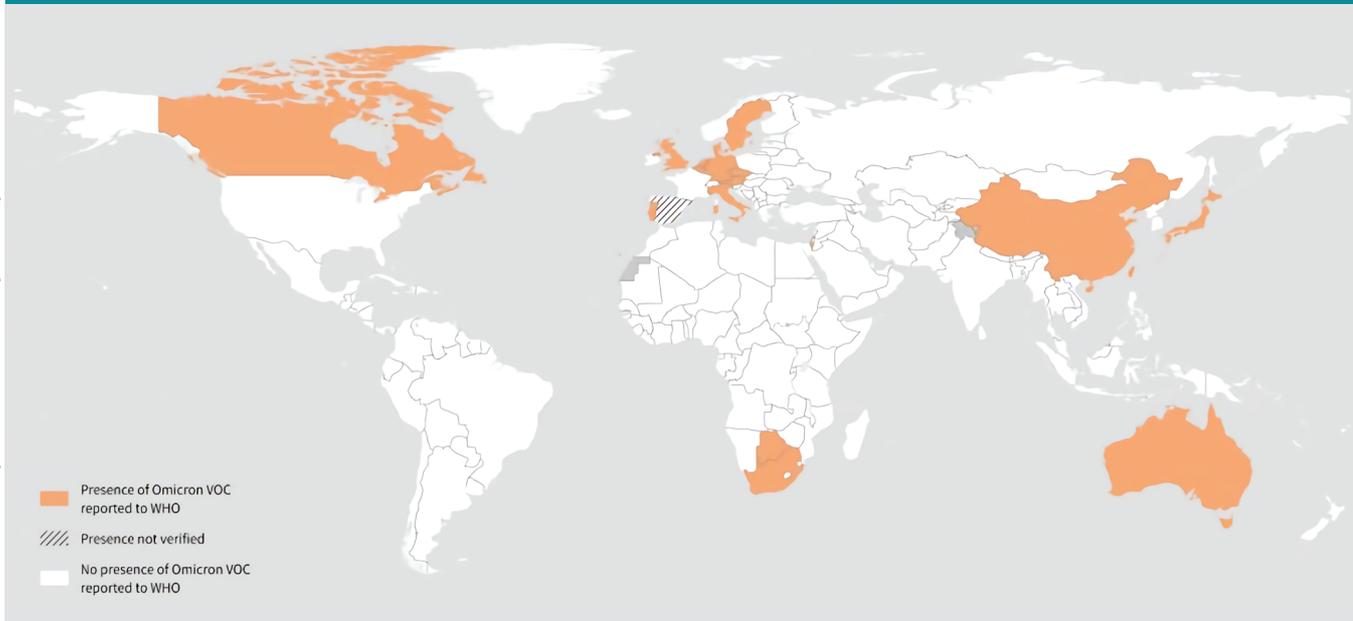
Tak hanya itu, Korsel juga melaporkan rekor penambahan angka kasus harian Covid-19 di negara itu. Korsel mencatat kenaikan angka kasus harian Covid-19 sebanyak 5.123 kasus dalam 24 jam hingga Rabu (1/12). Kenaikan kasus Covid-19 di Korsel juga membuat ketersediaan ranjang rumah sakit di negara itu hampir penuh. Secara keseluruhan, saat ini rumah sakit di Korsel merawat 723 pasien Covid-19 bergejala berat. (ashar;antara,kmng/dya)

**LAMPU KUNING**

**NEGARA "PENGIDAP" OMICRON**

- **Asal :**  
Benua Afrika
- **Status Penularan :**  
Penularan Tingkat Tinggi
- **Penerbangan WNA yang Diwaspada:**
  - Hongkong
  - Italia
  - Inggris
  - Afrika Selatan
- **Penerbangan yang Sudah Dilarang Masuk Indonesia:**
  - Afrika Selatan - Eswatini
  - Boswana - Malawi
  - Namibia - Angola
  - Zimbabwe - Zambia
  - Lesoto - Hongkong
  - Mozambik

**GAMBARAN WHO MENGENAI WILAYAH DI DUNIA YANG DITEMUKAN VARIAN CORONA OMICRON.**



The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization  
 Map Production: WHO Health Emergencies Programme  
 Not applicable



**NOW!!!****Peserta Pemilu Ditetapkan Mulai Tahun Depan**

# KPU: Desember 2022 Nama Parpol-Juni 2023 Capres

Jakarta-Entah apa yang menjadi batu sandungannya, hingga kini jadwal Pemilu 2024 belum diketok. Alasan yang mencuat, hal itu lantaran masih ada perbedaan pendapat antara KPU, DPR, dan pemerintah. KPU usul agar digelar 21 Februari, sementara pemerintah dan sebagian Komisi II ingin 15 Mei.

Meski begitu, Anggota KPU Hasyim Asy'ari memperkirakan partai politik peserta Pemilu 2024 akan diputuskan paling lambat Desember 2022. Ini akan menjadi salah satu tahap jelang Pemilu Serentak 2024.

"Kalau kita hitung mundur paling lambat pada Desember 2022 harus sudah ada partai politik peserta pemilu. Kalau sudah seperti ini, sudah tidak lama lagi, kan, karena Desember tahun depan sudah harus ada partai politik peserta pemilu," ungkap Hasyim dalam seminar bertajuk 'Dialog Kebijakan Pemilu Serentak' di Universitas Warmadewa, Bali, Rabu (12/11).

Ia menjelaskan, tahapan penentuan capres dan cawapres pada Pemilu 2019 jatuh pada 17 April 2019. Sehingga untuk tahapan Pemilu 2024, penentuan capres dan cawapres seharusnya jatuh pada Juni 2023.

"Kalau pengalaman yang lalu, 17 April 2019, penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) waktu itu 23 September 2018. Berarti maju dua bulan. Berarti bulan Juni 2023 sudah ada calon. Untuk merekrut seleksi, Juli sudah ada di DCT, berarti kerja partai sudah dimulai dari Desember 2022, sudah bekerja merekrut calon," ujarnya.

Sebelumnya, anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Pramono Ubaid Tanthowi mengapresiasi ihwal usulan jadwal Pemilu 2024 yang diajukan KPU.

"Terkait dengan hari H, KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak. Syukurnya, semua pihak pada akhirnya melihat bahwa tanggal yang diajukan KPU (21 Februari 2024) merupakan pilihan paling tepat," ujar Pramono.

Sosok yang akrab disapa Pram ini menuturkan KPU mengapresiasi pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara atau Pemilu 2024. "Sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2)," tutur dia.

Soal tahapan Pemilu 2024, menurut dia, KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR. Menurut rencana, dalam forum tersebut akan membahas



Rancangan Peraturan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal. Dalam surat tersebut, ia mengatakan KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada 7 Desember 2021 atau setidaknya sebelum memasuki masa reses.

## Politisasi Pemilu?

Menurut data yang ada sepanjang era reformasi, pemilu bisa berjalan baik karena ada kepastian jadwal yang sudah ditentukan. KPU yang bekerja pada periode tertentu, terbiasa menyusun jadwal dengan detail dalam jangka waktu tertentu.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Muhammad Ichsan Kabullah, mengingatkan detail program KPU membutuhkan kejelasan jadwal. Semakin awal persiapan dimulai, semakin baik persiapan dan penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan. Karena itulah, kengototan pemerintah

terkait jadwal baru itu dipertanyakan.

"Karena memang rezim pemerintah berkepentingan membuat jadwal pemilu yang menguntungkan rezim itu sendiri. Jadi jangan heran, tren pemilu yang berubah-ubah. Tidak pasti jadwal pemilu ini, sama dengan tidak pastinya mau pakai antigen atau PCR," katanya.

Ichsan membeberkan tahapan pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019. Dua pemilu ini menarik, karena terjadi peningkatan tingkat partisipasi pemilih, yang menjadi salah satu penanda kualitas pemilu. Data menunjukkan, pada 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,6 persen. Lima tahun kemudian, angkanya turun menjadi 84,1 persen. Tahun 2009, tingkat partisipasi turun lagi hingga ke 70,9 persen. Pada 2014, jumlahnya kembali naik mencapai 75,1 persen dan kemudian menjadi 81 persen pada Pemilu 2019.

Salah satu faktor naiknya partisipasi pemilih, adalah karena KPU

memiliki cukup waktu dalam persiapan. Pada Pemilu 2014 misalnya, ada 18 tahapan penyelenggaraan dari perumusan program hingga pelaksanaan yang memakan waktu 22 bulan. Pada 2019, ketika terjadi peningkatan pemilih, jumlah tahapan itu semakin dirinci menjadi 24 program.

Artinya, kata Ichsan, semakin rigid program disusun, hasilnya semakin baik. Syaratnya, kembali ke persoalan awal, KPU harus memiliki panduan waktu yang terukur.

"Ada kecenderungan Indonesia mengarah ke kondisi illiberal demokrasi. Dimana pemerintah tidak hanya mendominasi, tetapi juga sangat kuat mempengaruhi, termasuk dalam pengambilan keputusan hukum, serta institusi penyelenggaraan hukum itu sendiri. Termasuk untuk mempengaruhi Pemilu," kata Ichsan. Dia juga sepakat, bahwa apa yang terjadi saat ini adalah politisasi pemilu. (voa,ant,ist/dya)

